

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2009). Setiap pemerintahan memiliki laporan keuangan masing-masing untuk memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pihak internal maupun eksternal. Organisasi pemerintahan yang memiliki kendali atau kuasa atas perusahaan lain biasa disebut entitas induk, sedangkan Organisasi pemerintahan yang dikendalikan atau dikuasai disebut entitas anak. Entitas induk memerlukan laporan keuangan entitas anak untuk membuat laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai total sumber daya entitas hasil gabungan dari entitas anak kepada para pemegang saham, kreditur, dan penyedia dana lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Disisi lain, dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan perencanaan dimaksud,

pemerintah daerah perlu membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah (Rohaeni. 2014).

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan Negara. Untuk membuat suatu laporan yang dapat diterima dan mudah dimengerti maka pemerintah membuat beberapa peraturan dan ketentuan sebagai acuan atau dasar dalam menyusun laporan keuangan (Oktaviani. 2011).

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan suatu entitas bisnis. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan suatu entitas bisnis. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang dimiliki kepentingan seperti: Instansi pemerintah, manajer, dan kreditor dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi (Darminto, 2015:3).

Menurut Lapepo (2011) laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum / Badan Layanan Umum Daerah. Penyajian laporan konsolidasian ini sangat penting, mengingat laporan kondisi keuangan daerah secara menyeluruh. Maka dari itu perlu diperhatikan serius bagi entitas SKPD dalam penyusunan laporan keuangan masing-masing entitasnya, masing-masing entitas akuntansi dituntut harus memahami dengan baik penyajian laporan sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan informasi yang akurat, dapat dipercaya, andal dan tepat waktu.

Selain tuntutan keandalan laporan keuangan, transparansi juga menjadi hal utama yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam hal pengungkapan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak public yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan public menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak public (Sukhemi, 2011).

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berkedudukan sebagai pelaksana pada bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, yang menyangkut tentang penerimaan, belanja, pembiayaan dan asset daerah serta menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bersama dengan Seksi Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka penggabungan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dipimpin oleh Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah. Sebagai pelaku akuntansi pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tingkat daerah. Laporan keuangan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi tersebut tergabung menjadi satu dan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) terdapat 2 Entitas Penyelenggara yang melakukan pencatatan transaksi akuntansi yaitu :

- a. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPD sebagai satuan kerja yaitu mencatat transaksi keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada pada BPPKAD
- b. Transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai pemerintah daerah untuk mencatat transaksi keuangan, seperti pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja bunga, belanja kembali, belanja subsidi, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Dalam menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang, dari sistem akuntansi pemerintah daerah. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi tersebut menurut perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan pada akhir periode. Dalam hal ini masyarakat hanya mengetahui bagaimana akhir dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setelah di audit, akan tetapi belum mengetahui bagaimana proses sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terbentuk.

Adapun kondisi dilapangan, menurut Kepala seksi Pelaporan dan pertanggung jawaban di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang mengatakan kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Laporan Konsolidasi pemda ini salah satunya adalah minimnya data dari SKPD dan data yang disetor SKPD kepada BPPKAD sering berubah-ubah. Maka dari itu dengan adanya kendala dari SKPD ini menyebabkan terhambatnya dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah atau Laporan Konsolidasi. Pemilihan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang sebagai objek penelitian karena lembaga pemerintahan tersebut memiliki 2 fungsi yaitu sebagai SKPD dan PPKD sehingga tertarik pada bagaimana dalam proses penyusunan laporan konsolidasi kabupaten sampang.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis mengambil judul **“Prosedur Penyusunan Laporan Konsolidasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang”**.

1.2 Topik yang Dilaporkan pada Praktek Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam laporan praktek kerja lapangan ini yaitu “Prosedur Penyusunan Laporan Konsolidasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang”.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktek Kerja Lapangan

Tujuan dari praktek kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penyusunan Laporan Konsolidasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang.

1.4 Ladsan Teori (kutipan) dedy nurdiawans

1.4.1 Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Zaki Baridwan (2009:30).

Menurut Mulyadi (2016:4) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Narko (2007:3) prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional.

Menurut Ardiyos (2004:73) prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.

1.4.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi pada suatu periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan, yang dapat digunakan perusahaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Donal E kieso, dkk (2007:2) laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak pihak diluar perusahaan. Laporan ini meampilkan sejarah perusahaan yang dikuantitatifkan dalam nilai moneter.

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan.

Menurut Kasmir (2014:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Munawir (2002:56) laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015:2) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

1.4.3 Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi (biasa disingkat laporan konsolidasi) adalah laporan yang menggambarkan aspek ekonomi perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara individu tetapi berada dalam satu pengendalian. Laporan konsolidasi menjadi kewajiban jika terdapat adanya pengendalian.

Laporan konsolidasi menggambarkan kesatuan perusahaan induk dan anak-anak perusahaan yang dalam operasi sehari-harinya perusahaan-perusahaan tersebut adalah entitas-entitas yang terpisah.

Akuntansi memiliki peran penting dalam bisnis karena akuntansi menyediakan informasi mengenai laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan.

1.4.4 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, terdapat dua entitas penyelenggara, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau suatu organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan suatu organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

1.4.5 Laporan Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut entitasnya akuntansi dibedakan menjadi akuntansi sektor bisnis, yaitu akuntansi yang ditujukan untuk organisasi berorientasi laba atau perusahaan, dan akuntansi sektor publik, yaitu akuntansi yang ditujukan untuk organisasi yang tidak berorientasi mencari laba termasuk di dalamnya organisasi pemerintahan. Lingkup organisasi pemerintahan terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah terbagi lagi menjadi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Praktik akuntansi yang ditujukan untuk organisasi di pemerintahan daerah disebut dengan akuntansi pemerintah daerah

Laporan akuntansi pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual yang dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan.. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

1.5 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
2. Menganalisa permasalahan yang terjadi didalam perusahaan dan berupaya untuk memberikan saran perbaikan
3. Mengetahui kegiatan yang berhubungan langsung dengan topik yang ada di lapangan
4. mempraktekan soft skill dan hard skill yang didapat dalam masa kuliah

1.6 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya :

a. Manfaat PKL bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan secara langsung bagaimana praktek di dalam dunia kerja dan mendapatkan pengalaman kerja selama di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sampang.

b. Bagi Universitas Trunojoyo Madura Jurusan Diploma III Akuntansi

Menjadi suatu tolok ukur pembelajaran dan sarana peningkatan kualitas pengajaran dimasa yang akan datang.

c. Bagi Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sampang

Diharapkan dari hasil praktek kerja lapang ini memberikan kontribusi, dan manfaat bagi kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang.

d. Bagi Pembaca

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan yang sejenis di waktu yang akan datang.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang yang berlokasi di Jl. Rajawali No. 4. Pada tanggal 25 Januari dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2021. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilakukan setiap hari senin – jumat pukul 07.30 – 14.30 . Bidang yang diambil dalam Praktik Kerja Lapangan ini adalah Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Tabel 1.1

Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

[illegible]

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih suatu penelitian adalah ketersediaan sumber data yang merupakan salah satu yang terpenting untuk menyusun Tugas Akhir, karena sumber data memberikan informasi untuk memperoleh data-data yang akan disajikan dan dijabarkan dalam isi pembahasan tugas akhir ini. Dalam rangka memperoleh data-data dalam tugas akhir ini maka dibutuhkan teknik pengumpulan data sebagai langkah-langkah serta strategi dari penulis sehingga data-data yang diperlukan atau dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir dapat diperoleh dengan baik.

1.8.1.1 Sumber Data

Sumber data terbagi dua, yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Sumber data primer, yakni penuturan atau catatan para saksi mata. Data tersebut dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-bener menyaksikan suatu peristiwa. Data primer dalam penelitian berupa data yang didapat secara langsung dari pihak yang terlibat yaitu berupa wawancara atau interview terhadap Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan dan Kepala Seksi Bidang Pelaporan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subyek penelitiannya. Misalnya struktur organisasi yang diperoleh dari Bapak Rahmat.

1.8.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi merupakan langkah yang strategis untuk digunakan dalam suatu penelitian agar dapat mengetahui dan mendapatkan pengetahuan secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini memakai metode riset pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Pada teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada :

- a. Bapak Syuib selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan,
- b. Bu Santi selaku Kepala Seksi bidang Pelaporan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sampang. Pada teknik dokumen yang diperoleh yaitu Contoh Surat Pemberitahuan atau Surat Edaran untuk SKPD, Laporan Keuangan Salah satu SKPD (BPPKAD), Laporan Keuangan PPKD, Laporan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten Sampang.

1.8.2 Teknik Analisis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang didapat dari suatu pengamatan yang bisa berupa angka atau lambing atau sifat. Beberapa contoh data antara lain data populasi dan data simple, data primer, dan data sekunder (Situmorang, Muda dan Dalimunthe, 2010). Dalam penulisan tugas akhir ini metode yang digunakan yaitu metode pendekatan deskriptif. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan tentang fenomena secara nyata dan sistematis. Tujuan penelitian deskriptif yaitu menjelaskan tentang suatu fenomena yang diteliti secara nyata dan actual dengan membuat deskripsi atau gambaran fenomena tersebut secara sistematis.